



Political Will Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Dalam Memulihkan Ekonomi Negara di Era Pandemi

Dimas Rangga Agustin¹, Hanny Purnamasari², Kariena Febriantini³

¹Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

^{2,3}Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 25 Juni 2022

Revised: 27 Juni 2022

Accepted: 3 Juli 2022

A pandemic is a time when the world is in crisis, especially health and the economy. In addition to being faced with a health crisis, Indonesia is also facing an increasingly unhealthy economic condition. The sectors that have the most influence on the country's economy are the tourism sector and the creative economy. In this case, the ministry of tourism and creative economy (Kemenparekraf) is the institution that bears the duties and authorities. In this study, the researcher tries to explain in terms of the political will of the government, especially the Ministry of Tourism and Creative Economy in an effort to restore the country's economy in the pandemic era. The method used in this research is descriptive qualitative with a literature/literature study approach. The results and discussion in this study are based on Brinkerhoff's theory of political will which has 7 (seven) indicators in describing the organization's/government's efforts in providing political influence and creating public confidence in the government.

Keywords: Political Will, Tourist, Creative Economy, Economic Recovery, Pandemic

(*) Corresponding Author: dimas924.dr@gmail.com

How to Cite: Agustin, D., Purnamasari, H., & Febriantini, K. (2022). Political Will Ministry of Tourism and Creative Economy in Recovering the Country's Economy in The Pandemic Era. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(11), 353-364. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6838000>

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kepulauan yang luas dan alam beragam. Dalam memaksimalkan keberagaman alam yang dimiliki tersebut, pemerintah RI mengelolanya melalui sebuah kementerian yang bertugas dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pariwisata bernama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata, fungsi Kemenpar antara lain adalah untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang pengembangan industri dan kelembagaan pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, pengembangan pemasaran I, pengembangan pemasaran II, serta mengelola barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata.

Sejak akhir tahun 2019, menurut Keputusan Presiden RI Nomor 113/P tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, Kemenpar resmi menggandeng Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) menjadi satu kesatuan dalam kementeriannya yang kemudian bersatu dengan nama baru yaitu Kemenparekraf/Baparekraf.

Pada tahun 2020, terjadi kejadian luar biasa yang menimpa nyaris segala bagian dunia tercantum Indonesia. Terbentuknya pandemi Covid- 19 berikan akibat yang luar



biasa pada kehidupan manusia, salah satu yang utama merupakan pemberlakuan kebijakan pemerintah RI berbentuk karantina mandiri sampai program pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Indonesia menjadi negara yang termasuk mengalami resesi sebagai imbas dari situasi pandemic. Di tahun 2020, ditemukan tersendatnya pertumbuhan ekonomi di triwulan I dan pada triwulan II dan III negatif. Akibatnya banyak diantara masyarakat memiliki pendapatan rendah, tabungan yang rendah, dan cenderung tidak memiliki proteksi asuransi maupun tabungan serta status tenaga kontrak karena situasi pandemic ini (ILO, 2020).

Sebagian zona sedang mengalami kesulitan di masa pandemic COVID- 19 ialah: (1) Zona akomodasi dan ketersediaan pangan. Mengenai ini dihadapi penyusutan hasil karena terjalin penyusutan jumlah pelancong lokal dan luar negeri, banyak peristiwa canceling aktivitas semacam meeting/rapat, konferensi di hotel oleh lembaga pemerintah maupun swasta; (2) Zona Industri Pemrosesan yakni Industri Santapan Minuman hadapi penyusutan produksi imbas turunnya permintaan luar negeri, bisa dilihat dari data penjualan produk komoditas makanan dan minuman; (3) Kendaraan kereta dan udara yang alami penyusutan diakibatkan jumlah penumpang yang tidak banyak pula akibat terjadinya canceling ekspedisi kereta api dan pesawat karena dikhawatirkan penyebaran COVID- 19 (Tusianti, 2020).

Suasana pandemi Covid-19 telah mengganggu rantai pasok global, domestik, pasar keuangan, permintaan konsumen dan dampak negatif di seluruh wilayah utama, salah satunya petualangan dan pariwisata. Dampak pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi seluruh rantai nilai pariwisata, industri kecil menengah di bidang pariwisata, dan ekonomi kreatif (Sugihamretha, 2020).

Badan Pusat Statistik Catatan menunjukkan, jumlah wisman (wisman) yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 turun 7,62% dibandingkan kunjungan wisman pada Desember 2019 sebesar 1,37 juta. Hal itu ditetapkan karena penurunan kunjungan akibat wabah Covid-19 yang terjadi pada akhir Januari 2020.

Daerah yang terkena dampak meliputi akomodasi, pengolahan (terutama tekstil) dan perdagangan. Dalam hal ini, masih banyak yang bekerja sebagai pekerja informal. Di masa pandemi, banyak pengusaha yang mengalami kebangkrutan karena keterbatasan dana (ILO, 2020). Keterbatasan modal karena hak waris yang tidak seimbang (Kende-Robb, 2019).

Di sektor pariwisata nampak terdapat penyusutan yang besar dari kedatangan wisatawan orang asing serta canceling penerbangan tiket pesawat, hotel serta penyusutan pemesanan. Mengenai ini pula terjalin penyusutan sebab tersendatnya ekspedisi dalam negara, sangat utama wisatawan dalam negara, keraguan masyarakat buat melakukan ekspedisi, mereka khawatir penyebaran Covid- 19 di daerah wisata. Mengenai ini pula terjalin pada penyusutan bisnis pariwisata dan ekspedisi berdampak pada usaha UMKM, pekerja informal dan lapangan kerja terus jadi turun. Perlu kita ketahui jika selama ini pariwisata ialah zona padat karya yang menyerap tenaga kerja lebih dari 13 juta pekerja, akibat turunan maupun multiplier effect yang menjajaki tercantum industri turunan yang terbentuk dibawahnya pula hadapi imbas dari pandemi Covid-19 di zona pariwisata (Sugihamretha, 2020).

Kecuali bidang kesehatan, farmasi, kegiatan sosial, informasi dan komunikasi, air bersih, pengelolaan sampah dan daur ulang sampah, hampir seluruh industri di Indonesia menghadapi pandemi Covid-19. Area yang paling terpengaruh adalah transportasi, perjalanan, gudang, dan area di mana akomodasi dan makanan disediakan. Daerah lainnya adalah zona pariwisata Indonesia, menurut Sakernas 2019, hampir 11,83% tenaga kerja Indonesia berada di zona industri pariwisata. Sebagai perbandingan, pariwisata menyumbang hampir 4% terhadap PDB per tahun (Tusianti, 2020).

Berdasar informasi Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas), Angkatan kerja yang diserap oleh industri pariwisata terus meningkat jumlah tenaga kerjanya, dan penyerapan tenaga kerja nasional oleh industri pariwisata juga semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata dapat menjadi alternatif untuk mengurangi pengangguran.

Berdasarkan peristiwa tersebut, selanjutnya jika dampak pandemi Covid-19 dengan tugas dan fungsi Kemenparekraf/Baparekraf dikaitkan dan diselami lebih dalam, tentunya terdapat pertanyaan besar di sana tentang bagaimana strategi yang diambil oleh kementerian tersebut dalam menyikapi kondisi dan berbagai regulasi terkait pandemi. Ini menjadi sebuah tantangan dan rintangan baru bagi kemenparekraf khususnya dalam memulihkan dan memperbaiki ekonomi negara.

Berkaitan dengan upaya pemerintah pusat terutama dalam hal ini kemenparekraf dalam memulihkan ekonomi negara, sebagai pembantu presiden dan wakil presiden tentu kemenparekraf memiliki yang Namanya political vision yang dirumuskan dalam visi misinya disamping visi misi presiden dan wakil presiden. Sehingga sebagai upaya pencapaian political vision tersebut, perlu ada bentuk komitmen dan keyakinan dari pemerintah atau biasa disebut political will.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana political will Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam memulihkan ekonomi negara di Indonesia?”. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar komitmen serta keyakinan pemerintah dalam hal ini kemenparekraf dalam upaya memulihkan ekonomi negara di Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Treadway (2005) dalam Maher (2018), political will adalah “kesediaan aktor politik untuk mengeluarkan energi dalam mengejar tujuan politik”. Sehingga, dalam banyak keadaan, menciptakan political will menjadi tugas untuk mengembangkan kapasitas pemerintah. Sejalan dengan pendapat tersebut, Civil Society Organizations (CSO) dalam Ariyani & Nugroho (2017) mengatakan terkait political will, bahwa pemerintahan yang baik itu perlu kekuatan politik, efektivitas pemerintah dan keterlibatan aktif dari negara serta organisasi sosial masyarakat. Sehingga, implikasinya adalah kebijakan atau program yang dimiliki pemerintah tentu melibatkan publik, karena dasar dari pemerintah adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, fakta yang terjadi adalah banyak kebijakan-kebijakan yang terimplementasi tanpa adanya political will dari pemerintah. Bahkan, meskipun ada peran pemerintah masih belum dirasa cukup efektif oleh masyarakat. Oleh karena itu, analisis Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam upaya optimalisasi UMKM melalui pendekatan political will diperlukan karena untuk mengetahui seberapa besar komitmen pemerintah dari kebijakan/program yang telah disusun terhadap masyarakatnya.

Gambaran yang lebih jelas tentang political will muncul dari pemilahan menjadi komponen yang bermakna dan terukur. Untuk menemukan gambaran yang jelas itu, Brinkerhoff (2010) berusaha mendekonstruksi karyanya dan karya penulis lainnya mengenai political will Brinkerhoff (2007); Brinkerhoff (2000); Brinkerhoff & Crosby (2002) yang didukung oleh analisis desain serta implementasi kebijakan pro-kaum miskin Anderson et al. (2005) Morissey & Verschoor (2003) hingga membentuk tujuh indikator political will. Adapun tujuh indikator political will tersebut adalah sebagai berikut :

1. Inisiatif Pemerintah;
2. Prioritas;
3. Mobilisasi Dukungan Politik;
4. Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya;
5. Penegakan Hukum;

6. Kontinuitas Usaha; dan
7. Adaptasi dan Belajar

UU No. 10 Tahun 2009 tentang pengertian pariwisata ialah industri pariwisata merupakan kumpulan usaha saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/ atau jasa untuk pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata, dan usaha pariwisata adalah usaha dalam menyediakan barang dan/ atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan serta penyelenggara pariwisata. Industri pariwisata adalah salah satu industri yang memiliki keterkaitan dengan sektor lain, karena pariwisata dikatakan sebagai gabungan fenomena dan hubungan timbal balik yaitu adanya interaksi dengan wisatawan, supplier bisnis, pemerintah dan tujuan wisata serta masyarakat daerah wisata.

Sinergi ekonomi kreatif dan pariwisata menghasilkan pemulihan ekonomi dan pengembangan pariwisata yang positif, yang diharapkan dapat mengembangkan pemberdayaan masyarakat (masyarakat lokal) melalui ekonomi kreatif. Pemberdayaan bukan hanya tentang mengembangkan keterampilan ekonomi masyarakat yang masih tertekan oleh pandemi, tetapi juga tentang bekerja untuk meningkatkan kepercayaan diri, harga diri dan martabat, serta menjaga ketertiban budaya dan nilai-nilai budaya lokal. (Wulandari, 2014).

METODE

Riset ini memakai pendekatan deskriptif kualitatif serta pendekatan studi kepustakaan. Tata cara pendekatan kualitatif deskriptif ialah upaya menguasai bermacam konsep yang ditemui dalam proses riset, dengan memakai metode *content analysis* (analisis isi) serta studi kepustakaan (*library research*). Metode *content analysis* ialah tata cara riset yang digunakan buat mengenali simpulan dari suatu bacaan. Ataupun dengan kata lain, analisis isi ialah tata cara riset yang mau menguak gagasan penulis yang termanifestasi ataupun yang laten. Sebaliknya studi kepustakaan (*library research*) pada riset ini memakai tipe serta sumber informasi sekunder yang diperoleh dari hasil riset, postingan serta buku-buku rujukan yang mangulas topik yang berkaitan dengan tema penelitian (Iskandar, A., & Aqbar, 2019).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menurut Brinkerhoff dalam Fauzy (2015), political will dapat dimaknai sebagai "niatan pimpinan" untuk melaksanakan hal-hal yang dinilai perlu untuk kebaikan bersama dalam jangka panjang. Maka kajian political will ini berasal dari visi misi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugasnya. Di situasi negara yang saat ini sedang dilanda pandemi, ini menjadi tantangan bagi kemenparekraf dalam upaya memperbaiki dan memulihkan ekonomi negara di saat polemic pandemi melalui program kerjanya. Oleh sebab itu, agar program kerjanya tidak hanya wacana saja, maka perlu adanya pembuktian dari segi keyakinan dan keteguhan pimpinan atau yang disebut political will. Untuk menilai dan mengukur political will kemenparekraf, penelitian ini menggunakan aspek dari Brinkerhoff (2010). Berikut masing-masing aspek yang akan dijelaskan:

Inisiatif Pemerintah

Inisiatif Pemerintah dapat dipahami sebagai komponen yang menyangkut sumber dorongan dari pemerintah dalam hal ini kemenparekraf dengan membentuk program-program dalam usaha memulihkan ekonomi negara. Program yang menjadi Langkah kemenparekraf dalam memulihkan ekonomi negara, pertama, Program Bangga Wisata di Indonesia ialah Kampanye yang diluncurkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal (Kemenkomarves). Gerakan ini diharapkan dapat mendukung percepatan pengembangan pariwisata terintegrasi untuk menyediakan

infrastruktur konektivitas, menertibkan pembayaran digital menggunakan QRIS, menyediakan pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan melalui penerapan dan implementasi CHSE sebagai bagian dari implementasi semua protokol kesehatan 5 Destinasi Wisata khusus prioritas yang tercantum dalam destinasi.

Kedua, program Bangga Buatan Indonesia (BBI) ialah Gerakan nasional berupa gotong royong dari Usaha Mikro, Kecil serta Menengah (UMKM) buat UMKM Indonesia. UMKM Indonesia yang teruji tahan krisis ekonomi semenjak 1998, saat ini sangat terdampak pandemi COVID-19. Pertumbuhan teknologi internet serta imbauan social distancing sepanjang pandemi menegaskan kalau memasuki perdagangan online jadi metode sangat efisien bertahan serta mencapai penjualan optimal ke depannya. Pelakon UMKM, marketplace, pemerintah, serta segala warga Indonesia diharapkan ikut serta dalam gerakan nasional buat menggapai hasil yang diharapkan. Konsumen diharapkan lebih memilah beberapa barang buatan dalam negara, terlebih produk UMKM. Tercantum pemerintah yang hendak mengutamakan produk UMKM buat pengadaannya. UMKM serta ekonomi Indonesia hendak berjaya di negara sendiri.

Ketiga, program Indonesia Care/I Do Care. Pemerintah pula sudah Meluncurkan program Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) sebagai bagian dari program Indonesia Peduli/I Do Care. Rencana tersebut dikeluarkan untuk mengembangkan kapasitas kabupaten pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mempraktikkan prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan wilayah dalam semua aspek kegiatan mereka.

Keempat, program #BeliKreatifLokal. Realisasinya Sangat positif dan berdampak besar bagi banyak pelaku ekonomi kreatif. Proyek tersebut telah berjalan sejak April 2020 dan telah berhasil merekrut 6.738 tenaga kerja serta telah berhasil menjalin kemitraan dengan 6 e-commerce dan 2 jasa pengiriman online. Berangkat dari kesuksesan inisiatif #BeliKreatifLokal Jabodetabek, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melebarkan sayapnya dengan meluncurkan creative buy di Danau Toba. Sama seperti skema pendahulunya, skema ini berupaya membantu pelaku ekonomi kreatif lokal.

Prioritas

Prioritas dapat dipahami sebagai pilihan kebijakan atau program berdasarkan pertimbangan teknis, dan analisis keseimbangan opsi kebijakan atau program, antisipasi hasil yang memiliki kemungkinan buruk, dan peninjauan biaya dan manfaat. Dalam hal ini, Kementerian Pariwisata serta Ekonomi Kreatif (kemenparekraf) berencana saat pandemi berakhir akan berupaya untuk memulihkan dan menguatkan perekonomian di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Di katakan oleh wakil Menteri parekraf, Angela Tanoesoedibjo terdapat 5 strategi yang nantinya akan diprioritaskan. Pertama, membebaskan mereka dari kewajiban karantina serta pemberlakuan Visa on Arrival melalui perluasan pasar yang di antaranya pemulihan wisatawan nusantara, pemasaran produk ekonomi kreatif, dan persiapan pembukaan pembatasan wisatawan mancanegara secara bertahap. Dengan mengedepankan program kampanye Gerakan Nasional bangga Buatan Indonesia, Beli Kreatif Lokal dan Ada di Warung yang nantinya untuk memasarkan produk ekonomi kreatif.

Strategi kedua ialah meningkatkan kualitas kemampuan SDM di antaranya reskilling, upskilling, sertifikasi kompetensi, dan pendampingan serta wirausaha SDM parekraf. Ketiga, untuk destinasi pariwisata dan infrastruktur ekonomi kreatif maka perlu untuk memantapkan manajemen dan tata Kelola destinasi, pengembangan desa wisata, pengembangan revitalisasi destinasi, dan sarana ekonomi kreatif. Keempat, dengan pemberian insentif permodalan, standarisasi produk, sertifikasi Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability (CHSE) serta mengaktifkan Kembali usaha, kemenparekraf berupaya tingkatkan ketahanan dan tenaga saing pelaku usaha kreatif. Terakhir, di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif akan akan lebih ditekankan agar terwujud inovasi produk

dan jasa. Mengenai itu diantaranya produk wisata bermutu, fasilitas pengembangan produk dan jasa perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), serta transformasi digital.

Bagi Angela, sebagian kebijakan telah dikeluarkan buat menunjang pemulihan zona pariwisata serta ekonomi kreatif. Ia merujuk pada Pesan Edaran (SE) Satuan Tugas (Satgas) Covid- 19 Nomor 12 Tahun 2022 terpaut bebas karantina buat pelakon ekspedisi luar negeri (PPLN) ke Bali dan Batam Bintan. Tidak cuma itu, pula terdapat 9 pembukaan perbatasan Indonesia buat keperluan pariwisata buat wilayah Banten, Bali, Kepulauan Riau, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara.

Mobilisasi Dukungan Politik

Mobilisasi dukungan politik akan dipahami sebagai komponen yang meliputi sejauh mana aktor publik berkonsultasi, terlibat, dan memobilisasi stakeholder dalam upaya memperbaiki dan memulihkan ekonomi negara. Dalam mengatasi pandemic covid-19 dan memperbaiki pertumbuhan ekonomi nasional, upaya pemerintah yang dibantu oleh masyarakat telah menunjukkan hasil yang baik. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai salah satu sektor yang terdampak telah menjadi dukungan dari pemerintah untuk dapat pulih.

Melalui berbagai program yakni Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, dan Indonesia Care/I Do Care di sektor perhotelan dan pariwisata ini menjadi pendukung dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk pariwisata dan ekonomi kreatif. Sokongan pula sudah diberikan untuk kegiatan perfilman, Bantuan Pemerintah untuk Usaha Pariwisata (BPUP) dan dukungan akomodasi hotel bagi para tenaga kesehatan.

Untuk mendukung pengembangan Kawasan strategis pariwisata nasional dan pelatihan SDM pariwisata, pemerintah melalui PEN telah mengalokasikan dana sebesar 7,67 triliun rupiah pada tahun 2021.

"Program Promosi Insentif (BIP) pemerintah untuk peserta kawasan wisata dan ekonomi kreatif juga telah meningkatkan anggaran menjadi Rp 60 miliar tahun ini. Artinya naik hampir 3 kali lipat dibandingkan anggaran 2020 sebesar Rp 24 miliar," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto hampir pada Senin (27/09). Lebih lanjut disebutkan peserta BIP menargetkan ekonomi kreatif 7 sub sektor, yaitu Aplikasi, Pengembang Game, Kerajinan Tangan, Mode, Memasak, Film, dan Pariwisata.

Pada 2020, pemerintah memberikan hibah pariwisata senilai Rp3,3 triliun kepada pemerintah daerah untuk menahan dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. Hibah pariwisata akan meningkat menjadi Rp 3,7 triliun pada nilai nominal pada tahun 2021 dan dirancang untuk membantu pemerintah daerah dan industri, hotel dan restoran menghadapi menyusutnya pendapatan asli daerah (PAD) dan kendala keuangan akibat pandemi Covid-19.

"Mekanisme hibah ini akan disalurkan ke daerah yang menyasar pemerintah daerah dan pelaku usaha pariwisata, 101 pelaku usaha pariwisata kabupaten/kota berdasarkan berbagai kriteria yang telah dicanangkan," kata Menko Airlangga.

Kriteria yang dimaksud adalah ibu kota dari 34 provinsi yang berada di 10 destinasi wisata prioritas dan 5 destinasi super prioritas. Tercatat juga 100 kalender acara, destinasi bermerek, dan wilayah di mana pendapatan pajak hotel dan restoran menyumbang setidaknya 15% dari total PAD pada tahun fiskal 2019.

Pemerintah juga telah meluncurkan program Cleanliness, Health, Safety and Environmental Sustainability (CHSE) sebagai bagian dari program Indonesia Care/I Do Care. Rencana tersebut dikeluarkan untuk mengembangkan kapasitas kabupaten pariwisata

dan ekonomi kreatif untuk mempraktikkan prinsip-prinsip kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan wilayah dalam semua aspek kegiatan mereka.

Program Indonesia Care/I Do Care berjalan bersamaan dengan program lain dan sebenarnya diharapkan dapat menjadi kerjasama antar kementerian seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menerapkan protokol kesehatan destinasi wisata dengan taman nasional. status, hingga layanan dibuka kembali. Penerbangan internasional dibahas dan didiskusikan dengan Kementerian Perhubungan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.

“Melalui skema yang didukung pemerintah ini, industri pariwisata diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanannya untuk mendapatkan kepercayaan dari wisatawan domestik dan mancanegara,” pungkas Menko Airlangga.

Komitmen Publik dan Alokasi Sumber Daya

Komitmen publik dan alokasi sumber daya dapat dipahami sebagai komponen yang berkaitan dengan sejauh mana Pemerintah membuat keputusan dalam mendukung program-program yang dijalankan. Sepanjang ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah mencoba banyak proyek untuk meningkatkan kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia di kawasan ekonomi kreatif. Salah satunya meluncurkan inisiatif #BeliKreatifLokal. Realisasi inisiatif #BeliKreatifLokal sangat positif dan berdampak signifikan bagi banyak pelaku ekonomi kreatif. Program tersebut telah berjalan sejak April 2020 dan telah berhasil merekrut 6.738 tenaga kerja serta berhasil bermitra dengan 6 e-commerce dan 2 jasa pengiriman online. Berangkat dari kesuksesan inisiatif #BeliKreatifLokal Jabodetabek, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melebarkan sayapnya dengan meluncurkan creative buy di Danau Toba. Sama seperti skema pendahulunya, skema ini berupaya membantu pelaku ekonomi kreatif lokal.

Tidak hanya bantuan langsung, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga memberikan insentif berupa alokasi hibah dalam Rencana Pemulihan Ekonomi Nasional. Program-program tersebut antara lain; Stimulus Kredit Ekonomi Kreatif, KUR dan UMI, Keringanan Pajak dan Penjaminan Usaha Padat Karya. Belum lama ini, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus mendukung pelaksanaan program kerja intensif di kawasan ekonomi kreatif. Program padat karya difokuskan di Bali dan mencakup penciptaan hingga 150.000 pekerjaan.

Penegakan Hukum

Penegakan hukum dapat dipahami sebagai komponen yang berkaitan dengan pelaksanaan regulasi pemerintah dalam hal ini kementerian dalam upaya pemulihan ekonomi negara. Dalam perihal ini, upaya pemerintah dalam pemulihan ekonomi negeri sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik RI No 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka menunjang kebijakan keuangan negeri buat penindakan pandemi Covid- 19 serta/ ataupun mengalami ancaman yang membahayakan perekonomian nasional serta/ ataupun stabilitas Sistem Keuangan dan penyelamatan ekonomi nasional.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada bersamaan pada 8 September 2021. Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) telah diluncurkan pemerintah pada bersamaan pada 14 Mei tahun setelah itu buat lebih menekan penguatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tercantum industri kecil dan menengah (IKM).

Berdasarkan peraturan tersebut, Menteri Pariwisata serta Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Salahuddin Uno mengajak UMKM bekerjasama dengan platform digital market ataupun E-commerce. Dengan UMKM bergabung ke e-commerce, Sandiaga memperhitungkan bisa menghasilkan kesempatan usaha, membangkitkan ekonomi, serta menghasilkan lapangan pekerjaan. Perihal tersebut diinformasikan Sandiaga dikala membuka webinar daring kajian ekonomi series 5 dengan yang mengangkat tema Kerja sama Dengan Platform Digital Membawa UMKM Tanah Air Melangkah Maju di Jakarta, Rabu (25/5) lalu. Kegiatan webinar yang diadakan Kemenparekraf ini didukung juga oleh Yayasan Indonesia Setara. Dalam acara tersebut, CEO Kokikit Chef Hendro Soejadi mengatakan grupnya memperoleh sokongan dari Kemenparekraf serta Bhinneka dalam meningkatkan usaha menyajikan kuliner praktis khas Indonesia. Menparekraf sendiri menunjang langkah yang dicoba pihak Bhinneka buat mendesak UMKM dapat meningkatkan usahanya dengan transformasi ke digital market place. Cocok dengan gerakan nasional bangga buatan bangsa, grupnya sedari dini telah mengajak pelakon UMKM buat bertransformasi ke digital.

Kontinuitas Usaha

Kontinuitas usaha dipahami sebagai komponen yang mempertanyakan usaha jangka pendek, menengah dan panjang yang dilakukan kemenparekraf dalam upaya memulihkan ekonomi negara. Sepanjang masa pandemi Covid-19 2021, berupaya semaksimal mungkin untuk meluncurkan program dan kebijakan yang tepat sasaran untuk memulihkan kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam Jumpa Pers Akhir Tahun (JPAT) Senin (27/ 12/ 2021), Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno memaparkan berbagai program yang dijalankan kemenparekraf sepanjang tahun 2021.

"Berbagai program tersebut dihadirkan dengan membiasakan diri, inovasi, dan kerja sama dengan mengaitkan seluruh pemangku kepentingan pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pilar gerak kilat (Gercep), Gerak Bersama (Geber), dan Garap Segala Keahlian Lapangan Kerja (Gaspol)," ucap Menparekraf Sandiaga Uno dalam JPAT 2021 yang berlangsung di Balai Rung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Kantor Kemenparekraf/ Baparekraf, Jakarta. Gerak Cepat (Gercep) Dalam bingkai Gercep, Kemenparekraf memperkenalkan dorongan insentif yang berpihak kepada pelakon usaha pariwisata dan ekonomi kreatif. Gaspol diimplementasikan oleh Kemenparekraf melalui berbagai program kerja yang diharapkan dapat menggarap segala keahlian sehingga mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya buat masyarakat. Gaspol diimplementasikan oleh Kemenparekraf melalui berbagai program kerja yang diharapkan dapat menggarap segala keahlian sehingga mampu membuka lapangan kerja seluas-luasnya."

Adaptasi dan Belajar

Adaptasi dan belajar dipahami sebagai komponen yang berkaitan dengan evaluasi kemenparekraf dalam upaya memulihkan ekonomi negara. Tantangan terbanyak untuk kemenparekraf dikala pandemi tiba merupakan berubahnya sistem penjualan pada industri kreatif global. Apabila lebih dulu masyarakat lebih banyak membeli perlengkapan secara luar jaringan (luring), disaat pandemi tata cara tersebut tidak lagi digunakan. Pembeli tidak mau mengambil efek terpaut penularan Covid-19, sehingga sistem jual-beli beralih ke dalam jaringan (daring). Mengenai ini memberikan tantangan besar buat zona ekonomi kreatif tanah air. Sebabnya, tidak segala pelakon ekonomi kreatif di Indonesia memahami tata metode daring. Sehingga pada awal-dini pandemi berlangsung, tidak sedikit usaha kreatif yang terpaksa gulung tikar karena sedikitnya permintaan.

Tetapi, pemerintah lewat Kemenparekraf/Baparekraf tidak tinggal diam Mengenai hal tersebut. Pemerintah terus memutar otak buat mengubah tantangan ini jadi kesempatan. Akhirnya teretuslah program bimbingan terpaut memasarkan produk secara daring buat para pelakon ekonomi kreatif. Sejak bimbingan berlangsung, banyak pelakon ekonomi kreatif yang mulai membiasakan diri dengan teknologi dalam memasarkan produk mereka. Mengenai tersebut pula jadi salah satu kekuatan baru buat zona ekonomi kreatif tanah air. Nantinya, sehabis pandemi berakhir, kemampuan buat menguasai pasar daring hendak jadi nilai tambah buat pelakon ekonomi kreatif di Indonesia.

Kemenparekraf sudah melaksanakan pemulihan parekraf selama pandemi Covid-19. Namun, masih diperlukan perbaikan buat mencapai bangkitnya kembali zona tersebut. Protokol kesehatan jadi salah satu aspek utama bangkitnya zona parekraf. Sayangnya hingga dikala ini, masih banyak pelakon parekraf belum melakukan sertifikasi Cleanliness, Health, Safety & Environment (CHSE). Oleh karena itu, Kemenparekraf hendak terus menekan para pelakon usaha buat melakukan sertifikasi CHSE agar dapat jadi salah satu upaya untuk memunculkan rasa aman wisatawan dalam berwisata. Tidak hanya itu, salah satu yang hendak dicoba Kemenparekraf dalam pemulihan zona parekraf ialah membangun keseimbangan penyediaan (supply) dan permintaan (demand). Semacam menciptakan atraksi dan membangun tenaga tarik wisata, tingkatkan kuantitas dan kualitas produk ekonomi kreatif, hingga memperluas dan memperbesar konektivitas wisatawan.

Setelah itu, untuk mengakselerasi pemulihan zona parekraf serta merendahkan resiko lonjakan permasalahan, terdapat sebagian upaya yang sudah ditentukan oleh Kemenparekraf, ialah upaya akselerasi sertifikasi CHSE khususnya pada pusat destinasi wisata, menciptakan atraksi dan tenaga tarik baru di Indonesia, hingga terus berupaya melakukan pengaturan turis maupun menetapkan jumlah maksimal dalam satu destinasi wisata. Lebih lanjut, buat strategi pemulihan pariwisata dan ekonomi kreatif, industri pariwisata membutuhkan kerja sama penuh dari berbagai pemangku kepentingan, baik zona publik dan swasta.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bentuk inisiatif kemenparekraf dalam upaya pemulihan ekonomi negara ialah dengan mengandalkan 4 (empat) program unggulannya di antaranya Bangga Berwisata di Indonesia, Bangga Buatan Indonesia, Indonesia Care/I Do Care, dan Beli Kreatif Lokal. Masing-masing program tersebut telah memberikan pengaruhnya terhadap pemulihan ekonomi di Indonesia dan diharapkan program unggulan tersebut bisa menjadi penyelamat ekonomi untuk Indonesia.
2. Prioritas kemenparekraf dalam upaya pemulihan ekonomi negara diantaranya meringankan kebijakan pelayanan, meningkatkan kualitas SDM, memantapkan proses manajemen dan tata Kelola serta fokus untuk lebih menciptakan inovasi produk dan jasa. Semua prioritas tersebut menjadi pondasi pemerintah khususnya kemenparekraf untuk memperbaiki dan memulihkan roda perekonomian negara pasca pandemic.
3. Mobilisasi dukungan politik yang terjadi dalam upaya pemulihan ekonomi negara adalah dengan terlibatnya beberapa pihak yang ikut serta saling bahu membahu bekerja sama dan saling terintegrasi menjadi kunci dalam kelancaran pelaksanaan program yang telah ditentukan. Dengan adanya program yang telah ditetapkan, hal ini menjadikan segala yang berkaitan dengan usaha pemulihan negara khususnya dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi lebih terorganisir dengan baik.
4. Dalam indikator komitmen public dan alokasi sumber daya, kemenparekraf telah diunggulkan dengan keberlangsungan program #BeliKreatifLokal. Program ini

menjadi diandalkan sebab ini merupakan kunci untuk memberikan lapangan pekerjaan secara luas serta dapat mensejahterakan para pelaku UMKM. Dengan bantuan insentif dari pemerintah, program #BeliKreatifLokal ini sudah bisa memenuhi harapan pemerintah khususnya masyarakat yang sedang berjuang dalam memulihkan perekonomian.

5. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik RI No 23 Tahun 2020 tentang Penerapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Indonesia bisa lebih terkoordinir bersama-sama bergotong royong dalam upaya pemulihan ekonomi negeri ini. Karena sudah jelasnya regulasi dan hukum yang telah ditetapkan tersebut, baik itu pemerintah pusat atau daerah terutama kemenparekraf masing-masing dari Lembaga tersebut bisa memberikan regulasi dan hukum lanjutan yang berdasarkan dari regulasi dan hukum induknya.
6. Kontinuitas usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini yaitu kemenparekraf akan terus berlanjut seiring dengan kabar kondisi perekonomian yang semakin baik. Jika pelaksanaan strategi dan program bisa memberikan hasil yang baik dan dampaknya nyata maka hal ini bisa menjadi sebuah pencapaian baik pemerintah dalam upaya survive saat krisis pandemi.
7. Dalam beradaptasi dan mencoba memahami kondisi yang tidak biasa sebagai buah hasil dari era disrupsi yang dimana terjadinya perubahan secara massif dari segala sistem dan tatanan khususnya dalam bisnis, pemerintah dalam hal ini kemenparekraf telah banyak dihadapi dengan berbagai tantangan. Tuntutan untuk mengubah sistem yang awalnya konvensional menjadi lebih terdigitalkan telah menjadi sebuah pilihan yang diperlukan dalam menghadapi gejolak yang terjadi. Kemenparekraf pula masih perlu mengevaluasi Kembali berbagai strategi dan program yang telah dijalankan, terutama kaitannya dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat/wisatawan dalam berwisata. Kemenparekraf masih perlu menekankan para pelaku usaha dalam mendaftarkan usaha mereka agar memenuhi standar sertifikasi Cleanliness, Health, Safety & Environment (CHSE) demi keamanan dan kenyamanan bersama.

Saran

1. Implementasi dari bentuk inisiatif kemenparekraf dalam pelaksanaan program unggulan patut diberi apresiasi. Namun langkah lebih baik bentuk inisiatif ini tidak hanya karena mengalami paksaan keadaan, tapi perlu adanya antisipasi dan prediksi lebih lanjut dalam memahami keadaan. Kemudian dengan adanya bentuk inisiatif ini diharapkan tidak hanya mengubah keadaan lebih baik tapi juga bisa mengubah perilaku pemerintah dalam melihat potensi masyarakatnya begitupun sebaliknya, tidak selalu bergantung terhadap produk luar negeri.
2. Strategi yang diprioritaskan oleh pemerintah dalam hal ini kemenparekraf masih fokus terhadap subjek. Memang tidak bisa diabaikan bahwa kualitas kinerja dan SDM menjadi kapasitas yang perlu diunggulkan namun peningkatan untuk segi objek dalam hal ini mengenai pariwisata dan ekonomi kreatif juga perlu diperhatikan. Misalnya penyediaan fasilitas dan memperhatikan pelestarian tempat wisata, kedua hal tersebut merupakan sisi dari segi objek.
3. Dalam hal ini kemenparekraf telah menerima banyak dukungan politik baik dari masyarakat maupun pihak swasta. Karena hal ini telah menjadi program nasional sehingga keterlibatan dari berbagai pihak menjadi sebuah kewajiban bagi warga negara Indonesia demi kepentingan bangsa dan negara. Hanya saja dalam keadaan seperti saat ini dimana negara sedang dalam upaya pemulihan, sudah pasti negara telah banyak melakukan pencairan dana demi program pemulihan ekonomi. Pengawasan menjadi hal yang penting dalam mengendalikan semua proses

- tersebut, jangan sampai pemerintah terlalu fokus terhadap pengimplementasian program sedangkan proses program tersebut tidak mencapai target dengan baik.
4. Dalam komitmen public dan alokasi sumber daya, kemenparekraf telah bekerja dengan sangat baik. Hanya saja dikarenakan saat ini situasi telah memasuki transisi era serba digital, dimana keadaan memaksa kita untuk memanfaatkan kemutakhiran teknologi. Oleh karena hal tersebut, demi meningkatkan komitmen serta sumber daya penting untuk lebih memahami dan mendalami teknologi terkhusus bagi mereka yang berjuang menciptakan peluang bisnis.
 5. Bentuk penegakan hukum yang dilakukan pemerintah telah disepakati dan ditetapkan secara sah. Pengaturan regulasi dan hukum dalam menciptakan kedisiplinan dalam hal ini juga perlu dipertimbangkan oleh pemerintah, seperti halnya aplikasi pedulilindungi yang berperan baik dalam upaya penghentian penyebaran covid-19. Namun dalam hal ini pemerintah bisa menciptakan kedisiplinan yang berkaitan dengan aktivitas pariwisata, seperti regulasi atau hukum yang mengatur sertifikasi pelaku usaha yang sudah pemerintah lakukan yaitu sertifikasi CHSE.
 6. Dalam keberlangsungan serta kontinuitas program yang dijalankan, pemerintah harus lebih memperhatikan tingkat efektivitas setiap program yang sudah dijalankan. Apakah program yang dijalankan berjalan dengan baik? Kemudian apakah program tersebut masih bisa dilaksanakan dalam jangka Panjang?
 7. Pemerintah dalam hal ini kemenparekraf sekali lagi perlu untuk lebih meningkatkan evaluasi setiap pelaksanaan yang telah dijalankan. Setiap tantangan yang dihadapi tentu itu bukan perkara yang mudah, kendala atau hambatan pasti selalu hadir setiap saat. Oleh karena itu, kemenparekraf harus bisa lebih mengkoordinir lebih baik lagi dalam mengelola serta bisa menghasilkan solusi yang cepat secara bersama-sama dalam mengatasi setiap kendala atau hambatan yang terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Brinkerhoff, D. W. (2000). Assessing Political Will For Anti-Corruption Efforts: An Analytic Framework. *Public Administration and Development*.
- Brinkerhoff, D. W. (2007). Where There's a Will, There's a Way? Untangling Ownership and Political Will in Post-Conflict Stability and Reconstruction . *Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations*.
- Brinkerhoff, D. W. (2010). Unpacking The Concept of Political Will to Confront Corruption. *U4 Brief*.
- DW Brinkerhoff, B. C. (2002). Managing Policy Reform: Concepts and Tools for Decision-Makers in Developing and Transitioning Countries. *Kumarian Press*.
- Fauzy, A. (2015). Political Will Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2011-2012. *Jurnal Online Mahasiswa*.
- Humas. (2021, September 20). *Presiden Jokowi Terbitkan Keppres 15/2021 tentang Tim Gernas Bangsa Buatan Indonesia*. Retrieved from Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-terbitkan-keppres-15-2021-tentang-tim-gernas-bangsa-buatan-indonesia/>
- Ikang Murapi, D. A. (2022). Potensi Sektor Pariwisata Sebagai Strategi Pemulihan Ekonomi Provinsi NTB. *Jurnal Riset Ekonomi, Akuntansi, dan Perpajakan (REKAN)*.
- Kriswibowo, S. N. (2022). Political Will Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Upaya Optimalisasi UMKM di Sidoarjo. *Jurnal Trias Politika*.

- Nufaisa, H. T. (2020). *Pemulihan Ekonomi Pariwisata: Tinjauan Kebijakan dan Kemitraan di Tiga Lokasi dalam Konteks Pandemi*. Jakarta: UCLG ASPAC & APEKSI.
- Ramalan, S. (2021, Desember 28). *Berikut Deretan Program kemenparekraf Dalam Upaya Pemulihan Sektor Parekraf Sepanjang 2021*. Retrieved from iNews.id: <https://www.inews.id/finance/bisnis/berikut-deretan-program-kemenparekraf-dalam-upaya-pulihkan-sektor-parekraf-sepanjang-2021/4>
- Sulistiyawan, A. (2021). *Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19 Melalui Sektor Pariwisata. Jurnal Studi, Sosial, dan Ekonomi*.
- Trisha Aisyah Kusumajati, P. W. (2022). *Dampak Pandemi Terhadap Pelaporan Realisasi Anggaran Pada Sekretariat Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Jurnalku*.
- Anggarini, D. T. (2021). *Upaya Pemulihan Industri Pariwisata Dalam Situasi Pandemi Covid-19. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*.
- Anonim. (2020, Desember 9). *Siaran Pers : Kemenparekraf Evaluasi Program Pemulihan Parekraf Akibat Pandemi*. Retrieved from Kemenparekraf RI: <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/siaran-pers-kemenparekraf-evaluasi-program-pemulihan-parekraf-akibat-pandemi/>
- Anonim. (2021, Mei 24). *Bangga Berwisata Di Indonesia, Harapan Kebangkitan Pariwisata Nasional*. Retrieved from Kemenparekraf/Baparekraf RI: <https://pedulicovid19.kemenparekraf.go.id/bangga-berwisata-di-indonesia-harapan-kebangkitan-pariwisata-nasional/#:~:text=Bangga%20Berwisata%20di%20Indonesia%20merupakan,penyediaan%20pariwisata%20yang%20bertanggungjawab%20dan>